



Peran Sosial dan Keagamaan Manggalā di Vihara

Surya Putra Dusun Ngadisari

Studi Kepemimpinan Spiritual Buddhis Pedesaan

Danu Aryanto ^{1*}, Hesti Sadtyadi ²

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya, Indonesia

Email: aryantodanu10@gmail.com ¹, 15hestisadtyadi@gmail.com ²

*Penulis Korespondensi: suttaap@gmail.com

Abstract. *This study examines the social and religious roles of a Manggalā within the Buddhist community, with a case study in Dusun Ngadisari, Tempuran Village, Kaloran District, Temanggung Regency, Central Java. The Manggalā is a local religious figure who serves as both an elder and leader of the community in various religious rituals such as weddings, funerals, patidāna, and traditional ceremonies including gendurenan, nyadran kubur, and village selamatan. In Buddhist communities without a pandita, the Manggalā plays a central role as a spiritual guide and preserver of local traditions. This research employs a qualitative descriptive approach using observation, in-depth interviews, and documentation methods. The selection of a Manggalā is conducted through communal deliberation, based on spiritual and ritual competence, particularly in the aspects of sīla, samādhi, and paññā. The findings show that the Manggalā in Dusun Ngadisari fulfills his role with great dedication, both in guiding the community's spiritual life and participating in social matters such as conflict mediation, community empowerment, and maintaining social harmony among villagers.*

Keywords: *Buddhist Leadership; Javanese Traditions; Local Community; Manggalā; Religious Rituals;*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran sosial dan keagamaan seorang Manggalā dalam masyarakat Buddhis, dengan studi kasus di Dusun Ngadisari, Desa Tempuran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Manggalā adalah tokoh keagamaan lokal yang berperan sebagai sesepuh dan pemimpin umat dalam berbagai ritual keagamaan seperti pernikahan, kematian, patidana, serta upacara tradisional seperti gendurenan, nyadran kubur, dan selamatan desa. Dalam komunitas Buddhis yang belum memiliki pandita, Manggalā menjadi figur sentral sebagai pembina spiritual dan pelestari tradisi lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pemilihan Manggalā dilakukan melalui musyawarah berdasarkan kemampuan dalam praktik spiritual dan ritual, dengan penekanan pada nilai-nilai sīla, samādhi, dan paññā. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manggalā di Dusun Ngadisari menjalankan perannya dengan penuh dedikasi, baik dalam membina kehidupan spiritual umat maupun berkontribusi dalam aspek sosial, seperti mediasi konflik, pemberdayaan umat, dan menjaga kerukunan antarwarga.

Kata kunci: Buddhisme Pedesaan; Kepemimpinan Buddha; Komunitas Lokal; Manggalā; Ritual Keagamaan

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya dan agama, termasuk di dalamnya agama Buddha yang telah berakulturasi dengan tradisi-tradisi lokal. Di beberapa wilayah pedesaan, seperti di Kabupaten Temanggung, agama Buddha tidak hanya dipraktikkan sebagai ajaran spiritual semata, tetapi juga melekat kuat dalam kehidupan sosial dan adat masyarakat. Dalam konteks ini, muncul peran tokoh keagamaan lokal yang disebut Manggalā, yang memiliki fungsi unik dan penting dalam menjaga kelangsungan praktik keagamaan sekaligus tradisi lokal.

Manggalā merupakan tokoh non-ordained (bukan bhikkhu atau pandita) yang dihormati oleh umat karena kemampuannya dalam memimpin upacara-upacara keagamaan

serta memahami nilai-nilai moral dan adat setempat. Keberadaan Manggalā menjadi sangat krusial, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki pandita. Dalam masyarakat Buddhis pedesaan, Manggalā tidak hanya memimpin ritual keagamaan seperti pernikahan, kematian, dan patidāna, tetapi juga aktif dalam berbagai upacara tradisional seperti gendurenan, nyadran kubur, dan selamatan desa. Hal ini menunjukkan bahwa Manggalā memainkan peran ganda, yakni sebagai pemimpin spiritual dan penjaga budaya lokal.

Studi tentang kepemimpinan keagamaan lokal dalam Buddhisme Indonesia masih terbatas, khususnya yang mengkaji peran tokoh seperti Manggalā yang berada di luar struktur monastik formal. Sebagian besar penelitian tentang Buddhisme Indonesia cenderung berfokus pada sejarah, doktrin, atau perkembangan institusional, sementara dinamika kepemimpinan spiritual di tingkat akar rumput kurang mendapat perhatian. Padahal, dalam konteks masyarakat Buddhis pedesaan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, keberadaan tokoh seperti Manggalā menjadi tulang punggung keberlangsungan praktik keagamaan umat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dinamika peran Manggalā dalam komunitas Buddhis pedesaan, dengan fokus pada studi kasus di Dusun Ngadisari, Desa Tempuran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Dusun Ngadisari dipilih karena komunitas Buddhis di wilayah tersebut masih mempertahankan tradisi Manggalā secara konsisten, dan peran tokoh ini sangat sentral dalam kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat setempat. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana peran sosial dan keagamaan Manggalā dalam komunitas Buddhis pedesaan?; (2) Bagaimana proses pemilihan dan legitimasi Manggalā?; (3) Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Manggalā dalam menjalankan perannya?

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada studi kepemimpinan spiritual dalam konteks agama minoritas dan masyarakat pedesaan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana umat Buddha di Indonesia, khususnya di daerah yang tidak memiliki akses terhadap pandita atau bhikkhu, mengorganisir kehidupan keagamaan mereka melalui tokoh lokal yang dipilih dan dipercaya oleh komunitas.

Penelitian ini juga berkontribusi pada diskursus akademik tentang pluralisme agama di Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan keragaman agama yang luar biasa memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana komunitas-komunitas agama minoritas seperti umat Buddha mengorganisir kehidupan keagamaan mereka, mempertahankan identitas mereka, dan berinteraksi dengan komunitas mayoritas. Studi tentang Manggalā memberikan

wawasan tentang strategi survival dan adaptasi yang dikembangkan oleh komunitas Buddhis pedesaan dalam konteks demografis dan geografis yang menantang.

Lebih jauh, penelitian ini juga relevan dengan diskusi global tentang lokalisasi dan globalisasi dalam agama Buddha. Sementara Buddhisme semakin global dengan penyebaran ke berbagai negara di luar Asia, pada saat yang sama terdapat proses lokalisasi di mana Buddhisme beradaptasi dengan konteks lokal yang spesifik. Fenomena Manggalā di Indonesia dapat dipahami sebagai bagian dari proses lokalisasi ini, di mana struktur dan praktik Buddhis disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan demografis Indonesia, menciptakan bentuk Buddhisme yang unik dan khas Indonesia.

Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi komunitas Buddhis Indonesia secara lebih luas. Model kepemimpinan Manggalā yang demokratis, partisipatif, dan berbasis komunitas dapat menjadi inspirasi bagi vihara-vihara lain dalam mengembangkan struktur kepemimpinan yang sesuai dengan konteks mereka. Pengalaman Dusun Ngadisari dalam mengintegrasikan ajaran Buddha dengan tradisi lokal juga dapat menjadi pembelajaran berharga tentang bagaimana membangun Buddhisme yang berakar kuat dalam budaya Indonesia tanpa kehilangan identitas Buddhisnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam peran sosial dan keagamaan seorang Manggalā dalam komunitas Buddhis di Dusun Ngadisari, Desa Tempuran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Penelitian kualitatif pada dasarnya adalah kegiatan sistematis untuk menemukan suatu teori dalam sebuah realitas sosial, bukan menguji teori atau hipotesis (Safrudin et al., 2023).

Lokasi penelitian adalah Dusun Ngadisari yang masih mempertahankan peran Manggalā dalam struktur keagamaan komunitasnya. Subjek penelitian terdiri atas Pak Saidi sebagai Manggalā di Vihara Surya Putra sebagai informan utama, serta beberapa informan pendukung yang terdiri dari pengurus vihara dan anggota komunitas Buddhis setempat. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu memilih informan yang dianggap paling mengetahui dan memahami peran Manggalā dalam komunitas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: (1) Wawancara mendalam dengan informan utama dan pendukung untuk menggali informasi mengenai peran, fungsi, serta pandangan masyarakat terhadap Manggalā. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara namun tetap fleksibel dalam

mengembangkan pertanyaan sesuai dengan dinamika percakapan (Thalib, 2022); (2) Observasi partisipatif terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan yang dipimpin oleh Manggalā, termasuk upacara kematian, pernikahan, dan ritual tradisional lainnya; (3) Dokumentasi berupa foto kegiatan dan catatan lapangan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis ini lebih mementingkan subjek, proses, dan makna yang ada dalam penelitian, dengan berfokus untuk menjelaskan objek penelitian (Darma et al., 2024). Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyusunan data ke dalam tema-tema tertentu, dan interpretasi naratif untuk memahami peran Manggalā dalam konteks kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Buddhis setempat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Sosial-Religius Seorang Manggalā dalam Komunitas Buddhis Pedesaan

Dalam struktur keagamaan komunitas Buddhis di Dusun Ngadisari, peran Manggalā menempati posisi sentral sebagai pemimpin umat yang tidak hanya mengemban tanggung jawab spiritual, tetapi juga sosial dan kultural. Istilah Manggalā berasal dari kata "manggolo" atau pemuka, yang secara harfiah berarti "yang didepankan". Hal ini ditegaskan oleh Pak Saidi, Manggalā Vihara Surya Putra, yang menyatakan: "Kalau Manggalā itu manggolo, orang yang didepankan. Ibaratnya kalau di kerajaan itu senopati, kalau di tentara itu panglima."

Dari pernyataan ini, terlihat bahwa Manggalā diposisikan sebagai tokoh utama yang mengatur arah kehidupan keagamaan umat. Tidak sekadar pelaksana ritual, tetapi juga representasi otoritas religius yang dihormati, diakui, dan dipercayai oleh masyarakat. Fungsi Manggalā menjadi krusial karena dalam konteks komunitas Buddhis pedesaan seperti di Temanggung, keberadaan pandita atau bhikkhu sering kali terbatas. Maka, Manggalā menjadi alternatif struktural yang lahir dari kebutuhan umat akan pembina spiritual yang dekat, terjangkau, dan relevan dengan konteks budaya setempat.

Dalam konteks Buddhisme, kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengarahkan atau mengorganisasi, tetapi juga dengan nilai-nilai moralitas dan kebijaksanaan. Konsep kepemimpinan dalam tradisi Jawa, sebagaimana tertuang dalam Asta Brata, mengajarkan bahwa pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat luhur seperti Dewa Indra yang memberi kesejahteraan, atau Dewa Yama yang menegakkan keadilan (Benawa, 2014). Prinsip-prinsip ini tercermin dalam peran Manggalā yang tidak hanya memimpin ritual, tetapi juga menjadi panutan moral bagi komunitas.

Tanggung Jawab dan Fungsi Keagamaan

Tugas-tugas seorang Manggalā mencakup kegiatan keagamaan inti seperti memimpin upacara pernikahan, kematian, patidāna, pembacaan paritta, serta memberikan ceramah keagamaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Pak Saidi: "Yang saya tahu, seorang Manggalā itu tugasnya merawat orang meninggal, membantu persiapan pernikahan, dan membaca doa." Dalam komunitas seperti Dusun Ngadisari yang tidak memiliki pandita, Manggalā menggantikan posisi tersebut dengan melaksanakan peran serupa berdasarkan tradisi dan kearifan lokal.

Lebih lanjut, Pak Saidi menekankan pentingnya penguasaan aspek-aspek dasar keagamaan: "Seorang Manggalā itu harus bisa hafal paritta, jaga moral, bisa dhamma desana, dan memimpin ritual." Ini menunjukkan bahwa kualitas seorang Manggalā tidak hanya diukur dari kemampuannya dalam memimpin upacara, tetapi juga dari integritas moral dan kemampuan membina umat melalui ajaran Buddha. Dengan demikian, keberadaan Manggalā menjadi penopang utama berlangsungnya praktik keagamaan umat Buddha di tingkat akar rumput.

Peran Sosial dan Kultural: Menjaga Tradisi, Memperkuat Komunitas

Selain fungsi keagamaan, seorang Manggalā juga berperan dalam pelestarian budaya lokal. Dalam konteks masyarakat Jawa yang sangat kental dengan tradisi, praktik seperti selamatan desa, gendurenan, dan nyadran kubur tidak dapat dipisahkan dari identitas religius warga. Pak Saidi menjelaskan: "Selain memimpin ritual agama, juga pimpin tradisi adat umat Buddha di sini." Melalui peran ini, Manggalā menjadi jembatan antara agama dan budaya, menjaga kesinambungan nilai-nilai lokal sekaligus mengintegrasikannya ke dalam ajaran Buddha.

Pemimpin vihara bukan hanya sebagai pengelola tetapi juga sebagai figur spiritual yang membimbing umat dalam perjalanan rohani. Sebagai figur spiritual, pemimpin vihara memiliki peran yang signifikan dalam menyampaikan ajaran dan menjadi panutan moral (Darma et al., 2024). Dalam pelaksanaan kegiatan seperti anjangsana, Manggalā juga memberikan siraman rohani yang dimaksudkan untuk mempererat hubungan sosial sekaligus menumbuhkan keyakinan keagamaan. Pak Saidi menyatakan: "Saya juga kasih siraman rohani, biasanya pas anjangsana. Untuk memperkuat hubungan antarumat dan memperkuat keyakinan." Kegiatan ini menunjukkan dimensi informal dari kepemimpinan spiritual yang berbasis pada kedekatan emosional dan sosial antara pemimpin dan umat.

Proses Pemilihan dan Pembaruan Kepemimpinan Keagamaan

Dalam tradisi terdahulu, seorang Manggalā menjabat seumur hidup. Namun, di bawah kepemimpinan Pak Saidi, sistem ini diubah untuk memberi ruang regenerasi dan memperbarui struktur kepemimpinan keagamaan. Pak Saidi menjelaskan: "Dulu seorang Manggalā masa jabatannya dibawa sampai habis nyawa. Kalau sekarang saya sedang jalankan program baru: masa jabatan Manggalā berakhir setelah lima tahun." Perubahan ini mencerminkan sikap progresif dari komunitas Buddhis setempat yang sejalan dengan arahan dari Sangha Theravāda Indonesia (STI).

Pemilihan Manggalā dilakukan secara musyawarah atau pemilihan umum oleh umat vihara. Pak Saidi menjelaskan: "Manggalā itu ditentukan oleh umat. Dipilih umat setempat lewat musyawarah atau pemilihan seperti pemilihan kepala desa." Dengan demikian, kepemimpinan Manggalā tetap berbasis kepercayaan masyarakat, namun kini dilengkapi dengan sistem periodisasi yang memungkinkan evaluasi kinerja dan penyegaran tokoh. Konsep kepemimpinan pelayan telah dikenal dalam tradisi Jawa, sebagaimana tertuang dalam Asta Brata yang mengajarkan bagaimana seharusnya menjadi pemimpin yang baik (Benawa, 2014).

Tantangan Kepemimpinan dan Etos Pengabdian

Pak Saidi mengungkapkan bahwa menjalankan tugas sebagai Manggalā bukanlah hal yang mudah. Beliau menyatakan: "Berat... cuma berhubung sudah ditugaskan sama umat, walaupun berat ya saya jalani semampu saya." Ungkapan ini menunjukkan bahwa peran Manggalā tidak hanya menuntut kemampuan teknis, tetapi juga ketulusan, komitmen, dan kekuatan mental. Menjadi pemimpin umat berarti bersedia menjadi contoh dan rujukan dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip sukarela dan kesiapan membantu memperkuat solidaritas sosial dalam komunitas (Darma et al., 2024).

Tugas Manggalā dijalani tanpa imbalan finansial. Pak Saidi menjelaskan: "Manggalā tidak digaji. Tapi dari desa dikasih tanah sebagai ucapan terima kasih. Tanah itu nanti turun ke Manggalā selanjutnya." Penghargaan dalam bentuk tanah bersifat simbolik dan kolektif, bukan sebagai hak pribadi melainkan sebagai bentuk amanah yang dilanjutkan oleh penerusnya. Ini memperlihatkan bahwa Manggalā adalah jabatan berbasis pengabdian, bukan jabatan untuk mencari keuntungan material.

Lebih jauh, Pak Saidi mengakui keterbatasannya: "Saya sendiri masih banyak kekurangan. Bahkan kadang puja bakti saja saya bawa HP karena belum hafal." Namun, sikap rendah hati ini justru menunjukkan ketulusan dan kesadarannya akan tanggung jawab yang diemban. Beliau juga menekankan pentingnya kerja sama: "Semua bisa terlaksana karena kebersamaan, bukan karena saya pribadi. Manggalā dan Ketua Vihara tidak bisa apa-apa tanpa

dukungan umat." Pernyataan ini mencerminkan pemahaman bahwa kepemimpinan spiritual adalah tanggung jawab kolektif, bukan individual.

Manggalā sebagai Model Kepemimpinan Spiritual Lokal

Peran Manggalā di Dusun Ngadisari mencerminkan bentuk kepemimpinan spiritual yang berakar pada konteks lokal dan kebutuhan komunitas. Berbeda dengan struktur monastik formal yang hierarkis, kepemimpinan Manggalā bersifat demokratis dan partisipatif. Legitimasi Manggalā tidak berasal dari otoritas eksternal seperti ordinasi monastik, melainkan dari kepercayaan dan pengakuan komunitas.

Dalam Dasa Raja Dhamma, pemimpin harus menjaga keseimbangan dalam kebijakan dan memastikan bahwa tindakan tidak merugikan atau menciptakan konflik. Seorang pemimpin yang adil dan bijaksana akan menjaga keharmonisan di antara orang-orang yang dipimpinnya, dengan menghindari favoritisme dan diskriminasi (Benawa, 2014). Prinsip-prinsip ini tercermin dalam cara Pak Saidi menjalankan perannya, yang selalu menekankan musyawarah dan kebersamaan.

Manggalā juga berfungsi sebagai mediator dalam konflik sosial dan penjaga kerukunan antarwarga. Dalam masyarakat pedesaan yang erat dan komunal, konflik personal dapat dengan mudah meluas menjadi konflik komunal. Keberadaan figur seperti Manggalā yang dihormati dan dipercaya dapat membantu meredakan ketegangan dan memfasilitasi rekonsiliasi. Lebih jauh, melalui aktivitas keagamaan dan sosial yang dipimpinnya, Manggalā memperkuat ikatan sosial dan solidaritas dalam komunitas Buddhis, sekaligus memelihara identitas keagamaan mereka di tengah masyarakat yang mayoritas non-Buddhis.

Kontekstualisasi dalam Buddhisme Indonesia Kontemporer

Keberadaan Manggalā menunjukkan bagaimana Buddhisme beradaptasi dengan konteks lokal Indonesia. Berbeda dengan negara-negara Buddhis lainnya seperti Thailand, Myanmar, atau Sri Lanka di mana Sangha monastik sangat kuat dan tersebar luas, Buddhisme di Indonesia menghadapi tantangan geografis dan demografis yang unik. Komunitas Buddhis tersebar di berbagai wilayah, sering kali dalam jumlah kecil dan terisolasi, dengan akses terbatas terhadap bhikkhu atau pandita.

Dalam kondisi seperti ini, munculnya figur Manggalā adalah respons kreatif dan adaptif dari komunitas Buddhis untuk memenuhi kebutuhan spiritual mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip upāya (skillful means) dalam Buddhisme, di mana ajaran dan praktik disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi umat. Manggalā dapat dipahami sebagai bentuk lokalisasi atau pribumisasi Buddhisme, di mana struktur dan praktik keagamaan disesuaikan dengan konteks budaya dan sosial setempat tanpa mengorbankan esensi ajaran Buddha.

Fenomena Manggalā juga menunjukkan pentingnya agency (keagenan) komunitas dalam membentuk praktik keagamaan mereka. Alih-alih pasif menunggu bhikkhu atau pandita datang, komunitas Buddhis di Dusun Ngadisari secara aktif mengorganisir kehidupan keagamaan mereka dengan memilih dan memberikan mandat kepada Manggalā. Ini mencerminkan vitalitas dan kreativitas Buddhisme grassroots di Indonesia.

Komparasi dengan Model Kepemimpinan Spiritual Lainnya

Untuk memahami keunikan peran Manggalā, perlu dilakukan komparasi dengan model kepemimpinan spiritual lainnya dalam konteks Buddhisme Asia Tenggara. Di Thailand, misalnya, sistem kepemimpinan spiritual sangat terstruktur dan hierarkis, dengan Sangha yang memiliki otoritas formal dari tingkat nasional hingga lokal. Bhikkhu bukan hanya pemimpin spiritual tetapi juga bagian dari struktur birokrasi negara yang diakui secara resmi (Tambiah, 1976). Berbeda dengan Thailand, di Indonesia khususnya di daerah pedesaan seperti Dusun Ngadisari, struktur kepemimpinan spiritual lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi lokal.

Di Myanmar, kepemimpinan spiritual juga sangat terpusat pada Sangha monastik, namun terdapat juga peran penting dari umat awam yang mendukung kehidupan monastik melalui sistem dāna (pemberian) yang sangat kuat (Kawanami, 2013). Dalam konteks Lao, spiritualitas Buddhis sangat terjalin dengan kepercayaan animistik lokal, di mana bhikkhu sering kali juga berperan sebagai mediator dengan roh-roh lokal (Holt, 2009). Model Manggalā di Indonesia memiliki kemiripan dengan konteks Lao dalam hal integrasi antara Buddhisme dan tradisi lokal, namun berbeda dalam hal bahwa Manggalā adalah tokoh awam yang dipilih demokratis, bukan bhikkhu yang ditahbiskan.

Komparasi ini menunjukkan bahwa model Manggalā merupakan respons kreatif dan adaptif terhadap konteks spesifik Indonesia, di mana komunitas Buddhis merupakan minoritas yang tersebar dan memiliki akses terbatas terhadap struktur monastik formal. Model ini mencerminkan agency dan kreativitas komunitas lokal dalam mengorganisir kehidupan keagamaan mereka, sekaligus mempertahankan esensi ajaran Buddha.

Implikasi untuk Pengembangan Buddhisme Indonesia

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting untuk pengembangan Buddhisme di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pandita atau bhikkhu. Pertama, model Manggalā dapat dijadikan referensi untuk pengembangan kepemimpinan spiritual awam yang terlatih dan kompeten. Organisasi Buddhis nasional seperti Sangha Theravāda Indonesia (STI) atau Walubi dapat mengembangkan program pelatihan sistematis untuk calon-calon Manggalā, yang mencakup penguasaan paritta, kemampuan memimpin ritual, pemahaman Dhamma, serta keterampilan kepemimpinan dan mediasi sosial.

Kedua, pengalaman Dusun Ngadisari dalam mengimplementasikan sistem periodisasi jabatan Manggalā dapat menjadi best practice untuk komunitas Buddhis lainnya. Sistem ini memungkinkan regenerasi kepemimpinan, evaluasi kinerja, dan pembaruan ide, sekaligus mencegah stagnasi dan monopoli kekuasaan. Sistem demokratis dalam pemilihan Manggalā juga sejalan dengan semangat musyawarah dalam budaya Indonesia dan prinsip Sangha dalam Buddhisme.

Ketiga, peran Manggalā dalam mengintegrasikan ajaran Buddha dengan tradisi lokal Jawa menunjukkan pentingnya inkulturasi dalam pengembangan Buddhisme di Indonesia. Buddhisme yang dapat berdialog dengan budaya lokal akan lebih mudah diterima dan berakar dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip upāya-kauśalya (skillful means) yang menekankan pada fleksibilitas dan adaptasi metode sesuai dengan konteks, tanpa mengorbankan esensi ajaran.

Keempat, penelitian ini menunjukkan pentingnya dukungan struktural dan material bagi pemimpin spiritual awam seperti Manggalā. Meskipun dedikasi sukarela sangat penting, komunitas dan organisasi Buddhis perlu memastikan bahwa Manggalā memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif. Ini dapat berupa pelatihan berkelanjutan, akses terhadap literatur Dhamma, atau dukungan material yang memadai tanpa mengubah esensi pengabdian sukarela.

Terakhir, fenomena Manggalā mengingatkan kita bahwa vitalitas agama tidak hanya bergantung pada institusi formal, tetapi juga pada agency dan kreativitas komunitas lokal. Dalam konteks Indonesia yang plural dan beragam, kemampuan komunitas agama untuk beradaptasi dengan konteks lokal sambil mempertahankan identitas keagamaan mereka adalah kunci keberlangsungan dan perkembangan agama tersebut. Model Manggalā memberikan inspirasi bagaimana komunitas Buddhis dapat tetap hidup dan berkembang meskipun dalam kondisi yang menantang.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Manggalā memiliki peran yang sangat penting dan multidimensi dalam menjaga kehidupan keagamaan dan sosial komunitas Buddhis di Dusun Ngadisari, Kabupaten Temanggung. Sebagai pemimpin spiritual, Manggalā tidak hanya memimpin upacara keagamaan seperti pernikahan, kematian, dan patidāna, tetapi juga aktif dalam pelestarian tradisi lokal seperti gendurenan, nyadran kubur, dan selamatan desa. Peran ini menjadikan Manggalā sebagai jembatan antara ajaran Buddha dan budaya Jawa, memfasilitasi integrasi harmonis antara keduanya.

Dalam aspek sosial, Manggalā berfungsi sebagai mediator konflik, pembina moral umat, dan pemerkuat solidaritas komunitas. Keberadaan Manggalā sangat krusial dalam lingkungan yang tidak memiliki akses terhadap pandita atau bhikkhu, menjadikannya tulang punggung keberlangsungan praktik keagamaan umat Buddha di tingkat akar rumput. Pemilihan Manggalā dilakukan secara demokratis melalui musyawarah umat, dengan kriteria utama adalah kemampuan dalam praktik spiritual dan ritual, serta komitmen terhadap nilai-nilai sīla, samādhi, dan paññā.

Sistem kepemimpinan Manggalā telah mengalami evolusi, dari jabatan seumur hidup menjadi sistem periodik lima tahunan. Perubahan ini mencerminkan sikap progresif dari komunitas Buddhis setempat dalam menyeimbangkan antara tradisi dan kebutuhan akan regenerasi kepemimpinan. Meskipun tidak menerima gaji, Manggalā dihargai secara simbolis melalui pemberian tanah dari desa, yang mencerminkan apresiasi komunitas atas pengabdianya.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa peran Manggalā mencerminkan model kepemimpinan spiritual yang bersifat demokratis, partisipatif, dan berbasis kepercayaan komunitas. Legitimasi Manggalā tidak berasal dari otoritas eksternal, melainkan dari pengakuan dan kepercayaan umat. Model kepemimpinan ini selaras dengan prinsip-prinsip Dasa Raja Dhamma dan konsep kepemimpinan pelayan dalam tradisi Jawa, yang menekankan pada moralitas, keadilan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Keberadaan Manggalā juga menunjukkan bagaimana Buddhisme beradaptasi dengan konteks lokal Indonesia, mencerminkan kreativitas dan agency komunitas Buddhis dalam mengorganisir kehidupan keagamaan mereka di tengah keterbatasan akses terhadap struktur monastik formal. Fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk lokalisation atau pribumisasi Buddhisme, di mana praktik keagamaan disesuaikan dengan kondisi sosial-budaya setempat tanpa mengorbankan esensi ajaran Buddha.

Penelitian ini merekomendasikan agar peran Manggalā mendapat pengakuan dan dukungan lebih luas dari organisasi Buddhis nasional, termasuk penyediaan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas Manggalā dalam menjalankan perannya. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengkaji fenomena serupa di wilayah lain di Indonesia, guna memahami keragaman model kepemimpinan spiritual dalam Buddhisme Indonesia dan memberikan kontribusi pada diskusi akademik tentang lokalisation dan adaptasi agama dalam konteks plural dan multikultural.

Sebagai penutup, penelitian ini menegaskan bahwa kekayaan dan keragaman praktik keagamaan di Indonesia, termasuk dalam komunitas Buddhis, mencerminkan dinamika

interaksi antara ajaran universal dan konteks lokal yang spesifik. Manggalā sebagai tokoh kepemimpinan spiritual lokal bukan sekadar pengganti sementara dalam ketiadaan pandita, melainkan representasi dari kreativitas dan resiliensi komunitas Buddhis Indonesia dalam menjaga kesinambungan praktik keagamaan mereka. Keberadaan Manggalā menunjukkan bahwa Buddhisme Indonesia memiliki karakteristik unik yang berbeda dari Buddhisme di negara-negara lain, namun tetap autentik dalam esensi ajarannya. Dengan demikian, studi tentang Manggalā memberikan kontribusi penting bagi pemahaman kita tentang keragaman ekspresi Buddhisme dalam konteks global yang semakin terhubung namun tetap beragam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Saidi sebagai Manggalā Vihara Surya Putra yang telah bersedia menjadi informan utama dan memberikan wawasan mendalam tentang perannya dalam komunitas Buddhis Dusun Ngadisari. Terima kasih juga kepada pengurus dan umat Vihara Surya Putra yang telah memberikan dukungan selama proses penelitian. Apresiasi disampaikan kepada dosen pembimbing di STABN Raden Wijaya yang telah memberikan arahan metodologis dan teoretis dalam penyusunan penelitian ini. Akhirnya, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Benawa, A. (2014). Dimensi spiritual dalam kepemimpinan. *Humaniora*, 5(2), 872–885. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3180>
- Bodhi, B. (2011). *The noble eightfold path: Way to the end of suffering*. Buddhist Publication Society.
- Darma, W., Suyatno, T., & Siswoyo, E. (2024). Peran kepemimpinan dalam penguatan keyakinan (*sradha*) umat Buddha di Desa Tanjung Kabupaten Jepara. *Jurnal Pendidikan Buddha*, 7, 75–90. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i4.3751>
- Gombrich, R. F. (1988). *Theravada Buddhism: A social history from ancient Benares to modern Colombo*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203310878>
- Harvey, P. (2013). *An introduction to Buddhism: Teachings, history and practices* (2nd ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511800924>
- Hefner, R. W. (2001). *The politics of multiculturalism: Pluralism and citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia*. University of Hawai‘i Press.
- Holt, J. C. (2009). *Spirits of the place: Buddhism and Lao religious culture*. University of Hawai‘i Press. <https://doi.org/10.21313/hawaii/9780824833275.001.0001>
- Kawanami, H. (2013). *Renunciation and empowerment of Buddhist nuns in Myanmar-Burma: Building a community of female faithful*. Brill. <https://doi.org/10.1163/9789004245723>

- King, R. (1999). *Orientalism and religion: Post-colonial theory, India and the mystic East*. Routledge.
- Klinken, G. van, & Aung, S. (2017). *Citizenship in Myanmar: Ways of being in and from Burma*. ISEAS Publishing.
- Mulder, N. (1996). *Inside Southeast Asia: Religion, everyday life, cultural change*. Pepin Press.
- Pranoto, S. W. (2015). Lokalitas dan universalitas dalam Buddhisme Jawa. *Jurnal Filsafat*, 25(1), 1–24.
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Journal of Social Science Research*, 3(2), 1–15.
- Schedneck, B. (2015). *Thailand's international meditation centers: Tourism and the global commodification of religious practices*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315697284>
- Snodgrass, J. (2007). Defining modern Buddhism: Mr. and Mrs. Rhys Davids and the Pāli Text Society. *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*, 27(1), 186–202. <https://doi.org/10.1215/1089201X-2006-040>
- Subandi, A. (2018). Nilai spiritual tradisi temu manten adat Jawa dalam perspektif masyarakat Buddhis. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, dan Agama*, 4(1), 43–56.
- Swearer, D. K. (2010). *The Buddhist world of Southeast Asia* (2nd ed.). State University of New York Press. <https://doi.org/10.1353/book161>
- Tambiah, S. J. (1976). *World conqueror and world renouncer: A study of Buddhism and polity in Thailand against a historical background*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511558184>
- Tannenbaum, N. (1995). *Who can compete against the world? Power-protection and Buddhism in Shan worldview*. Association for Asian Studies.
- Taylor, J. L. (1993). *Forest monks and the nation-state: An anthropological and historical study in northeastern Thailand*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Thalib, M. A. (2022). Pelatihan teknik pengumpulan data dalam metode kualitatif untuk riset akuntansi budaya. *Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(1).
<https://doi.org/10.23960/seandanan.v2i1.29>
- Williams, P. (2009). *Mahāyāna Buddhism: The doctrinal foundations* (2nd ed.). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780203428474>